

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia 2005)
- Aridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 2005)
- Badri Munir Sucoko, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta; Erlanga, 2007)
- Djojodirjo, Moegni MA. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Prajna Paramita, 1982)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlanga, 1992)
- Habib Adjie, Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat, (Jakarta; Media Notaris, 2008)
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratis Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung, PT. Refilca Aditama, 2008)
- Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Mumi*, (Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2006)
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar, Pustaka Refleksi, 2010)
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1983.
- Prawironegoro Darsono, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010)
- Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Amru Hanifa Mukti, *Log, Cit*,
Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1982)
- R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intemasa, Jakarta 1980)

- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)
- , *Pokok Pokok Melawan Hukum*. (Bandung: Putra Abardin, 2007).
- Shardita, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Reveisi, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006)
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2020)
- Suhrawandi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek NOTaris*, Buku I (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- Brinda Anitha Wirastuti dan J Andi Hartanto, *Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak diserahkan Oleh Ahli Wariskepada Notaris lain*, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 20 No. 20, 2017
- Chandra Lesmana, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham*, Volume 5 Issue 1, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2019.
- Cut Era Fitriyeni, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebaai Baian dari Protokol Notaris*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 50.58.Th.XIV, 2012
- Hariyanto Budi, *Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kodes Etik Notaris Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris*, Vol. X No. 01, *Jurnal IUS*, 2022
- Nawaf Abdullah dan Munsyarif abdul Chalim, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, (*Jurnal akta*, 2017, vol 4 No. 4)
- Nurjannah, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan. 2018, *Analisa Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*, Vol. 2 No. 2, *Riau, Law Journal*, 2018.

- Purwaningsih, Endang. *“Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dan Rangka Kepastian Hukum”*, Vo. 2 No. 3, Jurnal Hukum, 2018.
- Putra Topan Adiya, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Atas Minuta Akta yang Rusak*, Jurnal, 2014
- Ratih Tri Jayanat, *“Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitanya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengkera Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Neeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn. Pontianak)”*, tesis (Semarang, Progra Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarja Diponegoro, 2010)
- Rico Andriansyah, dkk, *“Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau dari pasal 56 Undang – Undang Jabatan Notaris”*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 2018
- Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, *Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain*, Jurnal Akta, vol. 4 No.2, 2014.
- Tengku Erwinsyahbana, Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatannya Berakhir*, Lentea Hukum, Vol. 5 Issue 2, 2018.
- Wibawa, K.C.S. *Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid. Vol. 01 No. 40, Jurnal Crepindo, 2019*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja
dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Kode Etik Jabatan Notaris

[https://www.brilio.net/wow/101-kata-kata-motto-hidup-dari-tokoh-terkenal-
menginspirasi-2111085.html](https://www.brilio.net/wow/101-kata-kata-motto-hidup-dari-tokoh-terkenal-menginspirasi-2111085.html)